

Pergeseran Metrik Pariwisata dari Kuantitas ke Kualitas: Analisis Framework Quality Tourism dalam UU No. 18 Tahun 2025 dan Implikasinya bagi Pengukuran Kinerja Destinasi

The Shift of Tourism Metrics from Quantity to Quality: An Analysis of the Quality Tourism Framework in Law No. 18 of 2025 and Its Implications for Destination Performance Measurement

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

¹Institut Pariwisata Trisakti; ²Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id; ehastriana@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata global sedang mengalami pergeseran paradigmatik dari metrik berbasis kuantitas (jumlah kunjungan) ke metrik berbasis kualitas (nilai yang dihasilkan per wisman). Pergeseran ini ditandai oleh adopsi UN Statistical Commission atas Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism pada Februari 2024—sebuah kerangka pengukuran global baru yang melampaui GDP. Indonesia merespons pergeseran ini melalui UU No. 18 Tahun 2025 Pasal 7 yang secara eksplisit memandatkan "pariwisata berkualitas" sebagai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan nasional. Namun, UU tidak mendefinisikan indikator operasional Quality Tourism, menciptakan kesenjangan antara ambisi normatif dan kapasitas pengukuran. Artikel ini bertujuan merumuskan framework metrik Quality Tourism yang kontekstual untuk Indonesia berdasarkan lima dimensi Dwyer, Forsyth, dan Dwyer (2014) dengan adaptasi untuk konteks kepulauan dan keberagaman destinasi. Metode yang digunakan adalah *mixed-methods* yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan, benchmark internasional dari Singapura, Jepang, dan Selandia Baru, serta analisis data sekunder UN Tourism, JNTO, STB, dan BPS untuk periode 2019-2025. Temuan menunjukkan tiga pola utama: pertama, yield per wisman Indonesia (USD 1.267) berada di bawah Singapura (USD 1.700) dan Jepang (USD 1.410), menunjukkan ruang peningkatan kualitas yang signifikan. Kedua, Indonesia memiliki *measurement infrastructure* yang belum memadai untuk mengoperasionalkan Quality Tourism—TSA BPS fokus pada dimensi ekonomi, tetapi dimensi sosial-budaya dan lingkungan belum terukur sistematis. Ketiga, benchmark internasional menunjukkan bahwa adopsi Quality Tourism yang efektif memerlukan kombinasi mandat normatif dengan kapasitas pengukuran dan mekanisme insentif. Artikel ini mengusulkan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) dengan lima dimensi dan 25 indikator, serta merekomendasikan mekanisme operasionalisasi melalui Peraturan Pemerintah turunan UU No. 18/2025.

Kata Kunci: pariwisata berkualitas; yield per wisman; UU No. 18/2025; pengukuran kinerja destinasi; Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism

ABSTRACT

The global tourism sector is undergoing a paradigmatic shift from quantity-based metrics (arrival numbers) to quality-based metrics (value generated per tourist). This shift is marked by the UN Statistical Commission's adoption of the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism in February 2024—a new global measurement framework that goes beyond GDP. Indonesia responds to this shift through Law No. 18 of 2025 Article 7, which explicitly mandates "quality tourism" as a principle of national tourism governance. However, the Law does not define operational Quality Tourism indicators, creating a gap between normative ambition and measurement capacity. This article aims to formulate a Quality Tourism metric framework contextualized for Indonesia, based on the five dimensions of Dwyer, Forsyth, and Dwyer (2014) with adaptations for archipelagic and destination-diverse contexts. The methodology is *mixed-methods*, combining policy document analysis, international benchmarking from Singapore, Japan, and New Zealand, and secondary data analysis from UN Tourism, JNTO, STB, and BPS for the 2019-2025 period. The findings reveal three main patterns: first, Indonesia's yield per tourist (USD 1,267) is below Singapore's (USD 1,700) and Japan's (USD 1,410), indicating significant room for quality improvement. Second, Indonesia's measurement infrastructure is insufficient to operationalize Quality Tourism—BPS's TSA focuses on the economic dimension, but the social-cultural and environmental dimensions remain systematically unmeasured. Third, international benchmarks show that effective adoption of Quality Tourism requires a combination of normative mandate, measurement capacity, and incentive mechanisms. This article proposes the Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) with five dimensions

and 25 indicators, and recommends operationalization mechanisms through Government Regulations deriving from Law No. 18/2025.

Keywords: *quality tourism; yield per tourist; Law No. 18 of 2025; destination performance measurement; Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism*

1. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja sektor pariwisata secara global sedang mengalami pergeseran paradigmatik. Selama beberapa dekade, kinerja pariwisata diukur melalui metrik berbasis volume—jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (inbound arrivals), jumlah malam menginap (bednights), dan total penerimaan devisa (tourism receipts). Metrik-metrik ini sederhana, mudah dihitung, dan memungkinkan perbandingan lintas-negara yang konsisten. Namun, metrik volume memiliki keterbatasan fundamental: ia tidak menangkap nilai yang dihasilkan per wisman, tidak mengukur dampak terhadap komunitas lokal, dan cenderung mendorong kompetisi ke bawah dalam hal kualitas pengalaman (Dwyer, Forsyth, & Dwyer, 2020; Gössling, Scott, & Hall, 2018).

Pergeseran menuju metrik berbasis nilai (value-based metrics) mulai dipromosikan sejak 2010-an, dengan UN Tourism (sebelumnya UNWTO) sebagai institusi penggerak utama. Global Code of Ethics for Tourism (UN Tourism, 2021) dan International Code for the Protection of Tourists (UN Tourism, 2024) secara eksplisit menyerukan pergeseran dari growth maximization menuju quality enhancement. Pada Februari 2024, UN Statistical Commission mengadopsi Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST)—sebuah kerangka pengukuran global yang secara resmi melampaui GDP dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (UN Tourism, 2024a). Adopsi ini merupakan milestone dari proses tujuh tahun dan menandai titik balik definitif dalam cara komunitas statistik global memahami keberhasilan pariwisata.

Indonesia merespons pergeseran global ini melalui UU No. 18 Tahun 2025 Pasal 7 yang secara eksplisit memandatkan "pariwisata berkualitas" sebagai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan nasional. Namun, UU tersebut tidak mendefinisikan indikator operasional untuk mengukur pencapaian pariwisata berkualitas. Implementasi mandat Pasal 7 tergantung pada Peraturan Pemerintah turunan yang belum disusun pada saat artikel ini ditulis. Kesenjangan antara ambisi normatif (teks UU) dan kapasitas pengukuran (infrastruktur statistik) menciptakan tantangan fundamental bagi implementasi.

Kesenjangan ini memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Data UN Tourism (2026) menunjukkan bahwa Indonesia pada 2025 mencatat 15,4 juta kunjungan wisman dengan yield per wisman USD 1.267—angka yang masih di bawah Singapura (USD 1.700) dan Jepang (USD 1.410), meskipun di atas rata-rata global (USD 1.100) yang dilaporkan UN Tourism (2025). Tanpa kerangka pengukuran Quality Tourism yang operasional, peningkatan yield per wisman sulit dikelola secara sistematis—Kementerian Pariwisata mengandalkan angka-angka agregat yang tidak memungkinkan disaggregation per kluster destinasi, per segmen pasar, atau per dimensi pengalaman wisatawan.

1.1 Kesenjangan Penelitian

Literatur tentang Quality Tourism dalam konteks Indonesia menunjukkan tiga kesenjangan yang menjadi justifikasi penelitian ini. Pertama, studi yang secara eksplisit merumuskan framework Quality Tourism untuk Indonesia masih terbatas. Beberapa studi seperti Damanik (2020) dan Chaerunnisa (2021) membahas aspek kualitas pariwisata dalam konteks destinasi tertentu (Bali, Yogyakarta), tetapi tidak merumuskan kerangka pengukuran yang sistematis pada tingkat nasional. Studi Antariksa (2019) membahas kualitas pengalaman wisman di Indonesia melalui survei kepuasan, tetapi tidak mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dalam satu framework.

Kedua, analisis operasionalisasi mandat "pariwisata berkualitas" dalam UU No. 18/2025 belum ada. Sebagai regulasi yang baru disahkan enam bulan sebelum penulisan artikel ini, UU baru belum mendapat analisis akademis yang sistematis tentang bagaimana Pasal 7 dapat dioperasionalkan. Analisis normatif yang ada (Saputra, 2025) menjelaskan isi pasal tetapi tidak menawarkan kerangka

operasionalisasi yang konkret. Di sisi lain, studi-studi tentang reformasi pariwisata Indonesia (Pitana, 2017; Damanik, 2020) ditulis sebelum UU No. 18/2025 diketahui.

Ketiga, benchmarking Indonesia terhadap praktik Quality Tourism di negara-negara Asia belum dilakukan secara sistematis. Singapura dengan yield per wisman tertinggi di ASEAN (USD 1.700), Jepang dengan framework Cool Japan yang terintegrasi dengan pariwisata, dan Selandia Baru dengan International Visitor Conservation and Tourism Levy—semuanya memiliki pengalaman yang relevan untuk Indonesia. Namun, bagaimana pengalaman ini dapat diterjemahkan ke dalam framework kontekstual Indonesia belum dipetakan secara analitis.

1.2 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian:

RQ1: Bagaimana pergeseran paradigmatis dari metrik kuantitas ke metrik kualitas dalam literatur pariwisata global dan framework UN Tourism dapat diaplikasikan pada konteks pengukuran kinerja pariwisata Indonesia?

RQ2: Sejauh mana infrastruktur pengukuran pariwisata Indonesia saat ini—TSA BPS, data Kemenparekraf, dan survei kepuasan wisman—memadai untuk mengoperasionalkan mandat "pariwisata berkualitas" dalam UU No. 18/2025 Pasal 7?

RQ3: Framework pengukuran Quality Tourism seperti apa yang paling sesuai dengan konteks kepulauan dan keberagaman destinasi Indonesia, dan bagaimana operasionalisasinya melalui Peraturan Pemerintah turunan UU No. 18/2025?

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan konseptual Quality Tourism dalam literatur global dan framework UN Tourism; (2) mengevaluasi kapasitas infrastruktur pengukuran pariwisata Indonesia untuk mengoperasionalkan Quality Tourism; dan (3) merumuskan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) sebagai framework pengukuran kontekstual dengan lima dimensi dan 25 indikator, beserta rekomendasi operasionalisasi melalui PP turunan UU No. 18/2025.

1.3 Kontribusi Ilmiah

Artikel ini memberikan tiga kontribusi kepada literatur ekonomi pariwisata Indonesia. Pertama, kontribusi konseptual berupa adaptasi framework Quality Tourism Dwyer et al. (2014) untuk konteks Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, keberagaman destinasi, dan mandat konstitusional perlindungan warisan budaya. Adaptasi ini menambahkan dimensi archipelagic-contextual yang tidak ada dalam framework internasional generik.

Kedua, kontribusi empiris berupa benchmarking sistematis yield per wisman Indonesia terhadap tiga negara pembanding (Singapura, Jepang, Selandia Baru) dengan analisis faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan. Benchmarking ini menggunakan data periode 2019-2025 yang menangkap dinamika pasca-pandemi secara akurat.

Ketiga, kontribusi praktis berupa Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) dengan 25 indikator operasional yang dapat langsung digunakan oleh Kementerian Pariwisata dan BPS. IQTI disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada dan feasibility pengukuran di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Framework ini juga compatible dengan Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism yang diadopsi UN Statistical Commission pada 2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evolusi Konsep Quality Tourism

Konsep Quality Tourism berkembang secara bertahap selama lima dekade terakhir, melalui tiga fase utama. Fase pertama (1970-1990) ditandai dengan kritik terhadap pariwisata massal (mass tourism) yang dipandang menghasilkan dampak negatif terhadap destinasi (Butler, 1980; Cohen, 1979). Konsep "alternative tourism" muncul sebagai respons, dengan penekanan pada skala kecil, pelibatan masyarakat

lokal, dan minimasi dampak lingkungan. Namun, alternative tourism lebih merupakan oposisi terhadap mass tourism daripada framework pengukuran yang operasional.

Fase kedua (1990-2010) ditandai dengan formalisasi konsep sustainable tourism melalui UN Conference on Environment and Development (Rio, 1992) dan publikasi-publikasi UN Tourism berikutnya. Sustainable tourism memperkenalkan tiga pilar pengukuran—ekonomi, sosial, dan lingkungan—yang kemudian menjadi dasar bagi framework-framework kemudian (UNWTO, 2005). Namun, pengukuran sustainable tourism pada fase ini masih didominasi pendekatan kualitatif dan studi kasus; indikator kuantitatif yang dapat dibandingkan lintas-negara masih terbatas.

Fase ketiga (2010-sekarang) ditandai dengan formalisasi Quality Tourism sebagai framework pengukuran operasional. Dwyer, Forsyth, dan Dwyer (2014) dalam bukunya *Tourism Economics and Policy* merumuskan lima dimensi Quality Tourism yang dapat diukur: (1) economic contribution per tourist (yield); (2) length of stay dan revisit rate; (3) satisfaction wisatawan; (4) satisfaction komunitas lokal; dan (5) environmental footprint. Framework ini menjadi dasar bagi adopsi Quality Tourism oleh Singapore Tourism Board pada 2020, New Zealand Tourism Industry Association pada 2021, dan banyak institusi lain.

Perkembangan paling mutakhir adalah adopsi Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST) oleh UN Statistical Commission pada Februari 2024 (UN Tourism, 2024a). MST merupakan hasil dari proses tujuh tahun yang dipimpin Austria dan Spanyol sebagai co-chairs UN Tourism Committee on Statistics. Framework ini mengintegrasikan TSA (Tourism Satellite Account), SEEA (System of Environmental-Economic Accounting), dan indikator sosial ke dalam satu kerangka pengukuran terpadu. Adopsi MST menandai milestone definitif dalam pergeseran global dari metrik kuantitas ke metrik kualitas.

2.2 Lima Dimensi Quality Tourism

Framework Quality Tourism Dwyer et al. (2014) membagi pengukuran menjadi lima dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah economic contribution per tourist, yang diukur melalui yield per visitor, rasio pengeluaran wisman terhadap pengeluaran wisatawan domestik, dan kontribusi terhadap PDB lokal. Yield per visitor merupakan indikator paling sering digunakan karena datanya relatif tersedia melalui statistik tourism receipts dibagi jumlah arrivals. Namun, yield per visitor memiliki keterbatasan: ia tidak menangkap distribusi nilai antara pelaku usaha besar dan kecil, dan tidak memperhitungkan kebocoran devisa ke luar negeri.

Dimensi kedua adalah length of stay dan revisit rate. Length of stay (rata-rata malam menginap) menangkap kedalaman pengalaman wisatawan—semakin lama tinggal, semakin banyak interaksi dengan destinasi dan pengeluaran di berbagai kategori. Revisit rate (persentase wisman yang kembali) menangkap loyalitas wisatawan dan kualitas pengalaman pertama. Jepang dengan revisit rate sekitar 60% untuk wisman Asia Timur (JNTO, 2025) merupakan benchmark global yang menunjukkan korelasi kuat antara kualitas pengalaman dan repeat visits.

Dimensi ketiga adalah satisfaction wisatawan, yang diukur melalui survei kepuasan sistematis. Singapura mengelola Singapore Tourism Survey yang menghasilkan Tourist Satisfaction Index dengan skala 1-10 pada lima aspek: accommodation, F&B, transportation, attractions, dan overall experience (STB, 2024). Indonesia melalui BPS menjalankan Survei Karakteristik Wisatawan Mancanegara (SKWM), tetapi fokusnya lebih pada demografi dan pengeluaran daripada kepuasan pengalaman.

Dimensi keempat adalah satisfaction komunitas lokal, yang mengukur dampak pariwisata terhadap kualitas hidup masyarakat di destinasi. Framework New Zealand Tourism Industry Association (2021) menggunakan Host Community Sentiment Index yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kontribusi ekonomi, dampak lingkungan, dan perubahan sosial-budaya akibat pariwisata. Dimensi ini sering dianggap paling sulit diukur karena memerlukan survei primer yang costly, tetapi sekaligus paling penting untuk memahami sustainability jangka panjang.

Dimensi kelima adalah environmental footprint, yang mengukur dampak pariwisata terhadap lingkungan. Indikator operasional meliputi emisi karbon per wisman, konsumsi air per wisman,

produksi sampah per wisman, dan kerusakan ekosistem destinasi. Gössling et al. (2018) menunjukkan bahwa pengukuran dimensi ini semakin penting seiring dengan komitmen iklim global dan kesadaran konsumen terhadap pariwisata bertanggung jawab.

2.3 Quality Tourism dalam Konteks Negara Kepulauan

Aplikasi framework Quality Tourism pada negara-negara kepulauan menghadirkan tantangan dan peluang yang khas. Negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Maldives, dan Selandia Baru memiliki karakteristik yang membedakannya dari negara daratan: distribusi destinasi yang tersebar, heterogenitas ekosistem antar-pulau, ketergantungan pada transportasi udara/laut, dan kerentanan lingkungan yang tinggi (Hall, 2010; Scheyvens & Momsen, 2008).

Pembelajaran dari Maldives sangat relevan untuk Indonesia. Maldives mengadopsi high-yield, low-volume strategy sejak 1980-an—menargetkan wisman premium dengan kapasitas terbatas untuk melindungi ekosistem yang rapuh. Yield per wisman Maldives mencapai USD 2.300 pada 2024 (Ministry of Tourism Maldives, 2025), salah satu tertinggi dunia. Namun model Maldives memiliki trade-off: konsentrasi manfaat pada resort-resort mewah dengan kebocoran devisa tinggi ke luar negeri, dan partisipasi komunitas lokal yang terbatas (Domroes, 2001).

Selandia Baru menawarkan model yang berbeda. New Zealand Tourism Strategy 2025 mengadopsi tagline "tirohia a Aotearoa" (see New Zealand) yang menekankan kualitas pengalaman dengan tetap menjaga accessibility yang lebih luas daripada Maldives. International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL) sebesar NZD 100 per wisman yang diperkenalkan pada 2019 digunakan untuk konservasi dan pengembangan infrastruktur destinasi (Ministry of Business, Innovation and Employment New Zealand, 2024). IVL menjadi salah satu precedent utama bagi Pungutan Wisatawan di UU No. 18/2025 Pasal 57A Indonesia.

Untuk Indonesia dengan 17.000 pulau dan keberagaman ekosistem yang sangat tinggi, implementasi Quality Tourism memerlukan pendekatan yang diferensiasi per destinasi. Tidak semua destinasi Indonesia cocok dengan model Maldives (high-yield low-volume), dan tidak semua cocok dengan model Singapura (high-yield high-volume). Bali mungkin lebih dekat ke model Selandia Baru (moderate-yield moderate-volume), sementara Raja Ampat atau Komodo mungkin lebih dekat ke model Maldives. Pendekatan satu-ukuran-untuk-semua tidak sesuai dengan keberagaman kontekstual Indonesia.

2.4 Infrastruktur Pengukuran Pariwisata Indonesia

Evaluasi kapasitas pengukuran pariwisata Indonesia memerlukan pemahaman tentang infrastruktur statistik yang ada. Empat institusi menghasilkan data terkait pariwisata secara reguler. Pertama, Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan Tourism Satellite Account Indonesia sejak 2016 yang mengukur kontribusi ekonomi pariwisata dengan metodologi yang kompatibel dengan TSA: RMF 2008. BPS juga menjalankan Survei Karakteristik Wisatawan Mancanegara (SKWM) dan Survei Wisatawan Nusantara (SWN) secara tahunan yang mengumpulkan data pengeluaran dan demografi wisatawan (BPS, 2026).

Kedua, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menghasilkan data bulanan tentang arrivals wisman, pergerakan wisnus, dan kinerja destinasi prioritas. Kemenpar juga melakukan survei kepuasan wisman berkala, meskipun metodologi dan konsistensi survei ini belum sebaik SKWM BPS. Data Kemenpar sering digunakan untuk monitoring target RPJMN dan evaluasi program (Kementerian Pariwisata, 2026).

Ketiga, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menghasilkan data real-time tentang kedatangan wisman di titik-titik masuk (bandara, pelabuhan, border crossing). Data imigrasi menjadi basis utama bagi perhitungan arrivals, tetapi tidak mencakup dimensi pengeluaran, kepuasan, atau dampak. Keempat, Bank Indonesia menghasilkan data tourism receipts melalui Balance of Payments, yang menjadi basis bagi perhitungan yield per wisman agregat.

Keempat institusi ini menghasilkan data yang berguna, tetapi terdapat tiga gap yang signifikan untuk operasionalisasi Quality Tourism. Pertama, gap disaggregation: data yang ada agregat pada level

nasional dan tidak dapat disaggregation ke level destinasi spesifik, segmen pasar, atau dimensi pengalaman. Kedua, gap dimensi: data yang ada fokus pada dimensi ekonomi dan demografi, tetapi dimensi satisfaction komunitas lokal dan environmental footprint belum diukur secara sistematis. Ketiga, gap integrasi: data dari empat institusi tidak terintegrasi dalam satu dashboard yang memungkinkan analisis lintas-dimensi. Analisis lebih detail tentang gap ini akan disajikan di bagian Temuan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan (a) analisis dokumen kebijakan, (b) benchmarking komparatif internasional, dan (c) analisis data sekunder kuantitatif. Pendekatan hibrida ini dipilih karena pertanyaan penelitian melibatkan aspek konseptual (RQ1), aspek evaluatif (RQ2), dan aspek perumusan framework (RQ3) yang masing-masing memerlukan metodologi yang berbeda.

3.1 Sumber Data

Sumber data primer meliputi empat kategori. Pertama, dokumen kebijakan Indonesia: UU No. 18 Tahun 2025 (khususnya Pasal 7 tentang Pariwisata Berkualitas), Naskah Akademik UU No. 18/2025 (Kementerian Pariwisata, 2025), Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, dan dokumen perencanaan pariwisata provinsi yang relevan. Kedua, dokumen framework internasional: TSA: RMF 2008, IRTS 2008, Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism 2024, dan Global Code of Ethics for Tourism UN Tourism.

Ketiga, dokumen benchmarking dari tiga negara pembanding: Singapore Tourism Statistics 2024 dan Tourism Quality Framework STB; Japan Tourism Agency Strategic Plan 2023-2025 dan JNTO Tourism Satisfaction Index; New Zealand Tourism Strategy 2025 dan NZTIA Sustainable Tourism Framework. Tiga negara ini dipilih karena merepresentasikan tiga model Quality Tourism yang berbeda: Singapura (high-yield high-volume), Jepang (high-yield high-volume dengan kedalaman kultural), dan Selandia Baru (moderate-yield moderate-volume dengan environmental levy).

Sumber data sekunder kuantitatif meliputi: UN Tourism Data Dashboard (edisi April 2026) untuk arrivals dan receipts; JNTO Monthly Tourism Statistics untuk yield dan revisit rate Jepang; Singapore Tourism Board Annual Report untuk metrik Singapura; Statistics New Zealand Tourism Satellite Account untuk Selandia Baru; BPS TSA Indonesia 2022-2024 dan SKWM untuk data Indonesia. Periode data yang digunakan adalah 2019-2025 untuk menangkap dinamika pasca-pandemi secara komprehensif.

3.2 Prosedur Analisis

Tahap pertama adalah analisis konseptual pergeseran metrik. Literatur Quality Tourism ditelaah secara sistematis untuk menelusuri evolusi konsep dari sustainable tourism (1990-an) ke quality tourism (2010-an) ke Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (2024). Tahap ini menghasilkan peta konseptual yang menjelaskan hubungan antar-framework dan indikator yang berkembang.

Tahap kedua adalah evaluasi kapasitas pengukuran Indonesia. Lima dimensi framework Dwyer et al. (2014) digunakan sebagai kerangka evaluatif. Untuk setiap dimensi, diidentifikasi (a) data yang tersedia dari BPS, Kemenpar, atau institusi lain; (b) data yang potensial tersedia dengan modifikasi survei; dan (c) data yang belum tersedia sama sekali. Hasil evaluasi disusun dalam matriks gap analysis yang menjadi dasar untuk perumusan IQTI.

Tahap ketiga adalah benchmarking yield per wisman Indonesia terhadap tiga negara pembanding. Yield per wisman dihitung sebagai (total tourism receipts) / (total international arrivals) untuk tahun 2019 (baseline pra-pandemi), 2023 (awal pemulihan), dan 2025 (terkini). Perbandingan yield dilengkapi dengan analisis faktor-faktor kontekstual yang menjelaskan perbedaan: struktur pasar

(komposisi wisman per segmen), durasi kunjungan, harga komponen pariwisata, dan strategi positioning destinasi.

Tahap keempat adalah perumusan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI). Berdasarkan framework Dwyer et al. (2014) yang diadaptasi untuk konteks Indonesia, lima dimensi IQTI dirumuskan dengan masing-masing memiliki lima indikator operasional (total 25 indikator). Kriteria indikator meliputi: (a) relevansi dengan dimensi yang diukur; (b) feasibility pengukuran berdasarkan infrastruktur data yang ada atau potensial; (c) kontekstualitas dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan; dan (d) kompatibilitas dengan Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism.

3.3 Keterbatasan Metodologis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, analisis bersifat desk research—tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti survei kepuasan wisman atau survei persepsi komunitas lokal. Keterbatasan ini konsisten dengan lingkup artikel yang fokus pada perumusan framework, bukan pada pengukuran aktual Quality Tourism Indonesia. Studi tindak lanjut yang melakukan pengukuran empirik dengan IQTI akan melengkapi artikel ini.

Kedua, benchmarking hanya menggunakan tiga negara pembanding. Pemilihan tiga negara ini mempresentasikan tiga model yang berbeda tetapi tidak menggambarkan spektrum lengkap praktik Quality Tourism global. Benchmarking yang diperluas ke negara-negara Eropa dengan tradisi Quality Tourism mapan (Italia, Prancis, Austria) atau negara-negara Amerika Latin dengan konteks yang mirip Indonesia (Kosta Rika, Peru) dapat memperkaya analisis.

Ketiga, IQTI yang dirumuskan bersifat usulan yang memerlukan validasi melalui consultative process dengan pemangku kepentingan pariwisata Indonesia. Indikator-indikator yang diusulkan didasarkan pada feasibility teoretis berdasarkan infrastruktur data yang tersedia atau potensial, tetapi belum diuji secara empiris dalam implementasi. Studi implementasi pilot IQTI di destinasi-destinasi terpilih (misalnya 10 Destinasi Super Prioritas) akan memberikan validasi yang lebih kuat.

Keempat, data yield per wisman yang digunakan merupakan angka agregat nasional. Analisis yield pada level kluster destinasi atau segmen pasar memerlukan disaggregation data BPS yang berada di luar lingkup artikel ini. Studi kuantitatif lanjutan dengan akses data mikro BPS akan memungkinkan analisis yield yang lebih granular.

4. TEMUAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian dalam empat sub-bagian. Sub-bagian 4.1 memaparkan benchmarking yield per wisman Indonesia terhadap tiga negara pembanding. Sub-bagian 4.2 menyajikan gap analysis kapasitas pengukuran Indonesia untuk lima dimensi Quality Tourism. Sub-bagian 4.3 merumuskan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI). Sub-bagian 4.4 menganalisis operasionalisasi IQTI melalui infrastruktur data yang ada.

4.1 Benchmarking Yield per Wisman: Indonesia dalam Konteks Regional

Yield per wisman merupakan indikator paling sering digunakan dalam Quality Tourism karena merefleksikan nilai ekonomi yang dihasilkan per unit kunjungan. Perbandingan yield per wisman Indonesia dengan tiga negara pembanding memberikan baseline empirik untuk memahami posisi Indonesia dalam pergeseran paradigmatik global.

Tabel 1. Perbandingan Yield per Wisman (Tourism Receipts / International Arrivals) Indonesia dan Tiga Negara Pembanding, 2019-2025

Negara	Yield 2019 (USD)	Yield 2023 (USD)	Yield 2025 (USD)	Δ 2019-2025
Jepang	1.270	1.380	1.410	+11%
Singapura	1.580	1.640	1.700	+8%
Selandia Baru	2.840	2.920	3.050	+7%
Indonesia	1.190	1.240	1.267	+6%
Rata-rata global	1.070	1.080	1.100	+3%

(Sumber: analisis penulis atas data UN Tourism 2026, JNTO 2026, STB 2025, Stats NZ 2025, BPS 2026)

Tiga observasi penting dari Tabel 1. Pertama, yield Indonesia (USD 1.267) berada di atas rata-rata global (USD 1.100) tetapi jauh di bawah benchmark negara maju di kawasan. Selisih dengan Singapura mencapai USD 433 per wisman atau 34% lebih rendah. Selisih dengan Jepang USD 143 per wisman atau 10% lebih rendah. Selisih dengan Selandia Baru bahkan USD 1.783 atau 141% lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang peningkatan yield yang signifikan jika dapat menerapkan strategi Quality Tourism yang efektif.

Kedua, pertumbuhan yield Indonesia (+6%) sedikit lebih tinggi dari rata-rata global (+3%) tetapi lebih lambat dari Jepang (+11%). Gap pertumbuhan dengan Jepang mengkhawatirkan karena Jepang adalah negara dengan populasi wisman yang mirip dengan Indonesia (42,7 juta vs 15,4 juta pada 2025) tetapi yield-nya terus meningkat lebih cepat. Jika trend ini berlanjut, gap yield Indonesia-Jepang akan melebar.

Ketiga, Selandia Baru dengan yield USD 3.050 merupakan outlier yang menarik. Yield setinggi ini dicapai dengan kombinasi harga premium komponen pariwisata, segmen pasar high-value (fokus pada wisman Eropa, Amerika, Australia), dan International Visitor Conservation and Tourism Levy sebesar NZD 100 per wisman. Model Selandia Baru menunjukkan bahwa yield tinggi tidak harus diperoleh dengan strategi Maldives (ekstrem high-yield low-volume) tetapi dapat diperoleh dengan strategi moderate-volume + premium pricing + value-add yang kuat.

Faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan yield antar-negara perlu dianalisis lebih dalam. Tabel 2 menyajikan dekomposisi yield ke dalam komponen-komponennya.

Tabel 2. Dekomposisi Yield per Wisman ke Komponen-Komponennya, 2025

Komponen	Jepang	Singapura	Selandia Baru	Indonesia
Rata-rata length of stay (malam)	6,5	3,8	19,2	7,4
Rata-rata belanja/hari (USD)	217	447	159	171
Revisit rate (%)	~60%	~52%	~35%	~20%
% wisman premium (>USD 5k/trip)	~15%	~22%	~35%	~8%
Tourism levy (USD/wisman)	8	0	60	0 (rencana)
Yield per wisman (USD)	1.410	1.700	3.050	1.267

(Sumber: analisis penulis atas data JNTO 2026, STB 2025, Tourism New Zealand 2025, BPS 2026)

Dekomposisi ini memberi wawasan penting tentang strategi yield yang berbeda. Jepang mengandalkan kombinasi length of stay moderate (6,5 malam) dengan belanja harian moderate (USD 217) tetapi revisit rate yang sangat tinggi (~60%). Singapura mengandalkan belanja harian yang sangat tinggi (USD 447) dengan length of stay yang pendek (3,8 malam)—strategi khas destinasi urban-transit. Selandia Baru mengandalkan length of stay yang sangat panjang (19,2 malam) dengan konsentrasi wisman premium (~35%).

Indonesia memiliki length of stay yang comparable dengan Jepang (7,4 vs 6,5 malam), tetapi belanja harian yang jauh lebih rendah (USD 171 vs USD 217) dan revisit rate yang sangat rendah (~20%). Implikasinya: peningkatan yield Indonesia tidak semestinya diupayakan melalui peningkatan length of stay (sudah moderate) tetapi melalui peningkatan belanja harian dan revisit rate. Ini memerlukan intervensi pada sisi kualitas pengalaman dan diversifikasi produk, bukan sekadar penambahan hari kunjungan.

4.2 Gap Analysis: Kapasitas Pengukuran Indonesia

Evaluasi kapasitas pengukuran Indonesia untuk lima dimensi Quality Tourism Dwyer et al. (2014) dilakukan dengan memetakan ketersediaan data dari empat institusi utama (BPS, Kemenpar, Imigrasi, Bank Indonesia). Tabel 3 menyajikan hasil gap analysis ini.

Tabel 3. Gap Analysis Kapasitas Pengukuran Quality Tourism Indonesia untuk Lima Dimensi Dwyer et al. (2014)

Dimensi Quality Tourism	Data Tersedia	Data Parsial	Gap Utama
D1: Economic Contribution per Tourist	Yield per wisman agregat (BI); TSA BPS	Disaggregation per kluster destinasi	Tidak ada disaggregation per segmen pasar atau kluster destinasi
D2: Length of Stay & Revisit Rate	Rata-rata length of stay (BPS); durasi bulanan (Imigrasi)	Revisit rate estimasi dari SKWM	Tidak ada longitudinal tracking revisit rate per segmen
D3: Tourist Satisfaction	SKWM BPS (kepuasan umum); survei Kemenpar	-	Tidak ada Tourist Satisfaction Index yang terstandarisasi seperti STB
D4: Host Community Satisfaction	-	Studi akademik terpisah di destinasi tertentu	Tidak ada survei persepsi komunitas lokal secara sistematis
D5: Environmental Footprint	-	Data emisi transportasi (Kemenhub)	Tidak ada pengukuran carbon footprint per wisman, konsumsi air/sampah per wisman

(Sumber: analisis penulis atas publikasi BPS 2022-2026, Kemenpar 2024-2026, dan referensi institusional lainnya)

Gap analysis ini mengungkap tiga temuan struktural. Pertama, kapasitas pengukuran Indonesia sangat kuat pada Dimensi 1 (Economic Contribution) tetapi lemah pada Dimensi 4 (Host Community Satisfaction) dan Dimensi 5 (Environmental Footprint). Ini mencerminkan orientasi historis statistik pariwisata Indonesia pada aspek ekonomi-makro, yang sejalan dengan paradigma "pariwisata sebagai industri" UU No. 10/2009. Pergeseran menuju Quality Tourism membutuhkan ekspansi kapasitas pengukuran pada dimensi sosial dan lingkungan.

Kedua, gap disaggregation merupakan masalah umum di semua lima dimensi. Bahkan pada dimensi ekonomi yang paling kuat, Indonesia tidak memiliki yield data per kluster destinasi atau per segmen pasar. Implikasinya: analisis Quality Tourism tidak dapat dilakukan per destinasi Super Prioritas secara spesifik—hanya pada level nasional yang agregat. Kebijakan yang berbasis data per-destinasi sulit dirumuskan dengan infrastruktur data saat ini.

Ketiga, integrasi data antar-institusi terbatas. BPS, Kemenpar, Imigrasi, dan Bank Indonesia masing-masing menghasilkan data yang berguna, tetapi tidak ada platform terintegrasi yang menggabungkan data ini ke dalam satu dashboard yang mengukur Quality Tourism secara komprehensif. Pasal 17K-L UU No. 18/2025 tentang Sistem Data Kepariwisata Tunggal membuka peluang untuk integrasi ini, tetapi memerlukan operasionalisasi melalui PP turunan.

4.3 Indonesia Quality Tourism Index (IQTI): Usulan Framework

Berdasarkan analisis konseptual framework Quality Tourism dan gap analysis kapasitas pengukuran Indonesia, artikel ini merumuskan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) dengan lima dimensi dan 25 indikator operasional. IQTI disusun dengan empat prinsip: (a) kompatibilitas dengan framework internasional (Dwyer et al. 2014 dan MST UN Tourism 2024); (b) feasibility pengukuran berdasarkan infrastruktur data yang ada atau potensial; (c) kontekstualitas dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan; dan (d) akionabilitas untuk perumusan kebijakan operasional.

Tabel 4. Indonesia Quality Tourism Index (IQTI): Lima Dimensi dengan 25 Indikator Operasional

Dimensi	Indikator	Sumber Data	Tingkat Pengukuran
D1: Economic Value	1.1 Yield per wisman per kluster destinasi	BPS SKWM + TSA (disaggregated)	Nasional, Provinsi
	1.2 Rasio belanja wisman:wisnus	BPS SKWM + SWN	Nasional, Provinsi
	1.3 Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS PDRB + TSA	Provinsi, Kab/Kota
	1.4 Multiplier effect (direct/indirect/induced)	BPS IO Tabel + TSA	Nasional
	1.5 Rasio retention devisa (non-leakage)	Bank Indonesia BoP + analisis	Nasional
D2: Experience Depth	2.1 Rata-rata length of stay per segmen pasar	Imigrasi + BPS SKWM	Nasional, Kluster
	2.2 Revisit rate per segmen pasar	SKWM longitudinal	Nasional
	2.3 Diversitas aktivitas per wisman (jumlah atraksi)	SKWM extended module	Nasional, Kluster
	2.4 Penetrasi produk cultural/kreatif	Ticketing data + SKWM	Kluster
	2.5 Word-of-mouth propensity (NPS)	Survei tambahan Kemenpar	Nasional
D3: Tourist Satisfaction	3.1 Overall Tourist Satisfaction Index (skala 1-10)	Survei sistematis (baru)	Nasional, Kluster
	3.2 Satisfaction per komponen (akomodasi, F&B, transport, atraksi)	Survei sistematis (baru)	Nasional, Kluster

Dimensi	Indikator	Sumber Data	Tingkat Pengukuran
	3.3 Rasio complaints:total wisman	Sistem complaint terintegrasi	Nasional
	3.4 Online sentiment score (TripAdvisor, Google)	Social media analytics	Kluster, Destinasi
	3.5 Value-for-money perception	Survei tambahan	Nasional, Kluster
D4: Community Wellbeing	4.1 Host Community Sentiment Index	Survei masyarakat (baru)	Kab/Kota, Desa
	4.2 Proporsi tenaga kerja lokal (vs luar)	Sakernas disaggregated	Kab/Kota
	4.3 Income distribution Gini (destinasi)	BPS Susenas + analisis	Kab/Kota
	4.4 Preservasi budaya (indikator kualitatif)	Asesmen ahli budaya	Destinasi
	4.5 Akses masyarakat terhadap fasilitas pariwisata	Survei masyarakat (baru)	Destinasi
D5: Environmental Stewardship	5.1 CO2 emisi per wisman (transportasi + akomodasi)	KLHK + Kemenhub data	Nasional, Kluster
	5.2 Konsumsi air per wisman per hari	Data operator akomodasi	Destinasi
	5.3 Produksi sampah per wisman per hari	Data pengelolaan sampah lokal	Destinasi
	5.4 Indeks kualitas ekosistem destinasi	KLHK biodiversity index	Destinasi
	5.5 Carrying capacity utilization rate	Analisis destinasi + model	Destinasi Sensitif

(Sumber: usulan penulis, diadaptasi dari Dwyer et al., 2014 dengan konteks Indonesia)

IQTI dirancang untuk dapat dihitung secara bertahap sesuai kesiapan infrastruktur data. Dimensi 1 (Economic Value) dan Dimensi 2 (Experience Depth) dapat langsung dihitung dengan data BPS dan Kemenpar yang sudah ada, dengan sedikit modifikasi pada metodologi disaggregation. Dimensi 3 (Tourist Satisfaction) memerlukan pengembangan survei baru yang terstandarisasi. Dimensi 4 (Community Wellbeing) dan Dimensi 5 (Environmental Stewardship) memerlukan pengembangan infrastruktur pengukuran yang lebih substantial—termasuk survei masyarakat primer dan integrasi data dengan KLHK.

Skor komposit IQTI dapat dihitung dengan weighted average dari lima dimensi, dengan bobot yang dapat disesuaikan berdasarkan prioritas kebijakan. Usulan awal bobot: Economic Value 25%, Experience Depth 20%, Tourist Satisfaction 20%, Community Wellbeing 20%, Environmental Stewardship 15%. Bobot ini mencerminkan keseimbangan antara dimensi ekonomi (yang penting untuk penerimaan politik) dengan dimensi non-ekonomi (yang penting untuk sustainability jangka panjang). Skala IQTI 0-100 dengan threshold interpretasi: 0-40 (perlu intervensi mendesak), 41-60 (developing), 61-75 (established), 76-90 (high quality), 91-100 (world-class).

4.4 Operasionalisasi IQTI dalam Sistem Data Kepariwisata Tunggal

Pasal 17K-L UU No. 18/2025 tentang Sistem Data Kepariwisata Tunggal memberikan landasan hukum untuk operasionalisasi IQTI. Sistem ini diamanatkan untuk "mengintegrasikan data dari berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan" (Pasal 17L ayat 1). Integrasi data yang diamanatkan ini sejalan dengan kebutuhan IQTI untuk mengkonsolidasi data dari BPS, Kemenpar, Imigrasi, Bank Indonesia, KLHK, dan pemerintah daerah.

Operasionalisasi IQTI yang diusulkan terdiri dari tiga fase. Fase pertama (2026-2027) fokus pada Dimensi 1 dan 2 yang datanya sudah tersedia dengan modifikasi. Fase ini menghasilkan IQTI versi awal dengan 10 indikator dan dapat dipublikasikan bersamaan dengan TSA BPS. Fase kedua (2027-2028) memperluas ke Dimensi 3 (Tourist Satisfaction) dengan pengembangan survei kepuasan yang terstandarisasi. Fase ketiga (2028-2030) melengkapi dengan Dimensi 4 dan 5 yang memerlukan pengembangan infrastruktur pengukuran baru.

Koordinasi lintas-institusi menjadi kunci operasionalisasi. Dibutuhkan Peraturan Pemerintah turunan yang menetapkan (a) institusi penanggung jawab untuk setiap indikator IQTI; (b) protokol pertukaran data antar-institusi; (c) frekuensi pelaporan dan publikasi IQTI; dan (d) mekanisme validasi dan audit. Tanpa PP yang memformalkan koordinasi ini, IQTI berisiko menjadi framework konseptual tanpa implementasi aktual.

4.5 Studi Kasus: Aplikasi Konseptual IQTI pada Sepuluh Destinasi Super Prioritas

Untuk mengilustrasikan kegunaan IQTI dalam konteks kebijakan Indonesia, bagian ini menyajikan aplikasi konseptual framework pada sepuluh Destinasi Super Prioritas (DSP) yang diidentifikasi pemerintah sebagai fokus pengembangan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Bali, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat. Kesepuluh destinasi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda—dari destinasi heritage (Borobudur) hingga marine conservation (Raja Ampat)—yang membuat penerapan framework yang diferensiasi menjadi kritikal.

Aplikasi konseptual dilakukan dengan mengestimasi skor awal untuk masing-masing destinasi pada lima dimensi IQTI berdasarkan literatur yang tersedia, laporan pemerintah, dan penilaian ahli. Estimasi ini bersifat indikatif dan memerlukan validasi melalui pengumpulan data primer yang sistematis. Namun, sebagai ilustrasi konseptual, estimasi ini menunjukkan variasi kondisi destinasi yang signifikan.

Bali menunjukkan pola yang khas destinasi matang: skor tinggi pada Dimensi 1 (Economic Value) karena infrastruktur pariwisata yang lengkap dan yield yang relatif tinggi, tetapi skor rendah pada Dimensi 5 (Environmental Stewardship) akibat tekanan overtourism di kawasan selatan. Skor Dimensi 4 (Community Wellbeing) berfluktuasi antar-desa—tinggi di desa-desa dengan tradisi desa pakraman yang kuat (Ubud, Tenganan), tetapi lebih rendah di kawasan pesisir yang mengalami pergeseran ekonomi dari pertanian ke jasa pariwisata secara masif. Kebijakan berbasis IQTI untuk Bali akan fokus pada peningkatan Dimensi 5 melalui kontrol kapasitas destinasi dan investasi pada pengelolaan lingkungan.

Raja Ampat, dalam kontras, menunjukkan pola yang berlawanan: skor tinggi pada Dimensi 5 karena ekosistem marine yang relatif terjaga dan manajemen konservasi yang ketat, tetapi skor rendah pada Dimensi 1 akibat skala ekonomi pariwisata yang terbatas dan aksesibilitas yang mahal. Raja Ampat cocok dengan model high-yield low-volume seperti Maldives—yield per wisman kemungkinan sudah tinggi (estimasi USD 2.500-3.000 untuk wisman diving), tetapi jumlah wisman terbatas oleh kapasitas infrastruktur dan preservasi lingkungan. Kebijakan berbasis IQTI untuk Raja Ampat akan fokus pada mempertahankan Dimensi 5 sambil meningkatkan Dimensi 4 melalui redistribusi manfaat ekonomi ke komunitas adat lokal.

Danau Toba menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Destinasi ini memiliki potensi besar—danau vulkanik terbesar Asia Tenggara dengan budaya Batak yang kaya—tetapi kinerja pariwisata masih jauh di bawah potensi. Skor awal IQTI Danau Toba kemungkinan moderate di semua dimensi, dengan ruang peningkatan yang signifikan di Dimensi 2 (Experience Depth) melalui diversifikasi

produk wisata budaya dan Dimensi 3 (Tourist Satisfaction) melalui peningkatan standar layanan. Investasi infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah (bandara Silangit, jalan tol, Kaldera Toba) perlu dilengkapi dengan investasi pada dimensi-dimensi non-infrastruktural.

Labuan Bajo sebagai gerbang ke Komodo memiliki trade-off yang tajam antara Dimensi 1 dan Dimensi 5. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif masuk Pulau Komodo dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta pada 2022 (yang kemudian dibatalkan karena resistensi) merupakan upaya eksplisit untuk menggeser Labuan Bajo ke model high-yield low-volume. Dalam kerangka IQTI, kontroversi ini dapat dianalisis dengan lebih baik: apakah kenaikan tarif meningkatkan Dimensi 1 (yield) dan Dimensi 5 (environmental) tetapi menurunkan Dimensi 4 (community wellbeing, karena akses masyarakat lokal terdampak)? Framework yang multi-dimensi memungkinkan evaluasi yang lebih holistik dibandingkan debat yang hanya berbasis satu indikator.

Mandalika dengan MotoGP merupakan kasus menarik tentang event-driven tourism. Skor Dimensi 1 naik signifikan selama event (belanja wisman meningkat 200-300% pada periode MotoGP berdasarkan data BPS 2024), tetapi sustainabilitas pola ini perlu dievaluasi. Dimensi 4 (Community Wellbeing) kontroversial karena proses pembebasan lahan di kawasan KEK Mandalika menimbulkan konflik dengan masyarakat adat Sasak. Dimensi 5 juga perlu perhatian karena konsumsi air untuk sirkuit dan infrastruktur di kawasan yang relatif kering. IQTI untuk Mandalika perlu fokus pada peningkatan Dimensi 4 dan 5 untuk memastikan event tourism tidak menjadi ekstraktif jangka pendek.

Borobudur sebagai World Heritage Site memiliki karakteristik khusus: Dimensi 5 (Environmental Stewardship) diinterpretasikan dalam konteks konservasi heritage, bukan sekadar ekosistem alam. Kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah pengunjung ke candi utama (maksimal 1.200 orang per hari sejak 2022) merupakan aplikasi dari prinsip Quality Tourism—mengorbankan kuantitas untuk kualitas pengalaman dan preservasi. Skor Dimensi 3 (Tourist Satisfaction) kemungkinan meningkat setelah kebijakan ini karena pengalaman pengunjung menjadi lebih tenang dan mendalam. IQTI untuk Borobudur dapat menjadi model untuk destinasi heritage Indonesia lainnya.

Likupang, Wakatobi, dan Morotai, sebagai destinasi yang relatif baru dikembangkan, menunjukkan pola skor IQTI yang masih rendah di hampir semua dimensi—bukan karena destinasi buruk, tetapi karena infrastruktur pariwisata dan kapasitas pengukuran masih dalam tahap awal. Framework IQTI untuk ketiga destinasi ini berfungsi sebagai baseline untuk monitoring perkembangan, bukan sebagai evaluasi kinerja. Investasi yang tepat dalam 5-10 tahun ke depan dapat meningkatkan skor IQTI dari moderate-rendah menjadi moderate-tinggi.

Bromo-Tengger-Semeru menghadirkan isu sensitivitas ekologi dan kultural yang khas. Kawasan ini merupakan taman nasional sekaligus rumah bagi komunitas Tengger yang memiliki tradisi Hindu Tengger yang unik. Skor Dimensi 4 (Community Wellbeing) dan Dimensi 5 (Environmental Stewardship) perlu dimonitor ketat karena pertumbuhan wisatawan yang cepat dapat mengancam baik ekosistem maupun kelangsungan tradisi. Framework IQTI untuk kawasan ini perlu melibatkan tokoh-tokoh adat Tengger dalam penentuan indikator dan target.

Tabel 5 merangkum estimasi pola skor IQTI awal untuk kesepuluh destinasi, memberikan peta awal untuk intervensi kebijakan yang diferensiasi.

Tabel 5. Estimasi Indikatif Pola Skor IQTI pada Sepuluh Destinasi Super Prioritas

Destinasi Super Prioritas	D1 Economic	D2 Experience	D3 Satisfaction	D4 Community	D5 Environmental
Bali	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Moderate	Rendah
Borobudur	Moderate	Tinggi	Tinggi	Moderate	Tinggi
Danau Toba	Rendah	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Labuan Bajo	Tinggi	Tinggi	Moderate	Rendah	Moderate
Mandalika	Moderate	Moderate	Moderate	Rendah	Rendah

Destinasi Super Prioritas	D1 Economic	D2 Experience	D3 Satisfaction	D4 Community	D5 Environmental
Bromo-Tengger-Semeru	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Raja Ampat	Moderate	Tinggi	Tinggi	Moderate	Tinggi
Wakatobi	Rendah	Moderate	Moderate	Moderate	Tinggi
Likupang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Moderate
Morotai	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Moderate

(Sumber: estimasi penulis berdasarkan literatur dan laporan institusional; memerlukan validasi empirik)

Dua observasi dari Tabel 5. Pertama, tidak ada destinasi yang menunjukkan pola skor tinggi di semua lima dimensi—ini konsisten dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa Quality Tourism merupakan aspirasi yang tidak pernah sempurna tercapai, melainkan proses pengembangan terus-menerus (Ruhanen et al., 2015). Kedua, pola skor yang diferensiasi antar-destinasi menguatkan argumen bahwa kebijakan nasional yang seragam tidak akan efektif—setiap destinasi memerlukan intervensi yang disesuaikan dengan profil skor IQTI-nya masing-masing.

Implikasi untuk kebijakan: IQTI dapat berfungsi sebagai alat diagnostik yang memungkinkan Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah mengidentifikasi area prioritas intervensi per destinasi. Destinasi dengan skor Dimensi 5 rendah memerlukan intervensi pengelolaan lingkungan. Destinasi dengan skor Dimensi 4 rendah memerlukan program redistribusi manfaat dan pelibatan komunitas. Destinasi dengan skor Dimensi 3 rendah memerlukan peningkatan standar layanan. Pendekatan yang diferensiasi seperti ini secara signifikan lebih efektif dibandingkan pendekatan satu-ukuran-untuk-semua yang selama ini dominan.

5. DISKUSI

Bagian diskusi ini mengelaborasi tiga argumen yang dibangun dari temuan. Pertama, pergeseran global ke Quality Tourism merupakan imperatif yang tidak dapat dihindari bagi Indonesia, tetapi implementasinya memerlukan kalibrasi terhadap konteks kepulauan dan keberagaman destinasi. Kedua, IQTI sebagai framework pengukuran memiliki potensi transformatif tetapi juga mengandung risiko yang perlu dimitigasi. Ketiga, operasionalisasi Quality Tourism memerlukan kombinasi mandat normatif (UU), kapasitas pengukuran (IQTI), dan mekanisme insentif (PP turunan).

5.1 Pergeseran Global ke Quality Tourism sebagai Imperatif

Pergeseran dari metrik kuantitas ke metrik kualitas dalam pengukuran kinerja pariwisata bukan sekadar tren akademis—ia merupakan imperatif struktural yang digerakkan oleh tiga faktor. Pertama, tekanan daya dukung lingkungan (carrying capacity) di destinasi-destinasi populer global. Fenomena overtourism di Venice, Barcelona, Machu Picchu, Mount Fuji, dan Bali menunjukkan bahwa peningkatan arrivals tanpa kontrol kualitas menghasilkan degradasi destinasi yang pada akhirnya mengurangi nilai ekonomi itu sendiri (Milano et al., 2019). Quality Tourism menawarkan alternatif yang menghindari jebakan ini.

Kedua, perubahan preferensi konsumen global pasca-pandemi. Data UN Tourism (2025) menunjukkan bahwa wisman pasca-pandemi cenderung mencari pengalaman yang lebih mendalam, lebih autentik, dan lebih bertanggung jawab dibandingkan pola konsumsi pra-pandemi. Belanja rata-rata wisman meningkat dari USD 1.070 (2019) menjadi USD 1.100 (2024)—kenaikan 3% yang mengindikasikan trading up ke produk-produk premium. Destinasi yang masih mengandalkan strategi volume murah akan kehilangan daya tarik bagi segmen pasar yang semakin berkualitas.

Ketiga, tekanan kebijakan global terkait iklim dan sustainability. Adopsi Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism oleh UN Statistical Commission pada Februari 2024 menandai

bahwa pengukuran sustainability pariwisata sekarang menjadi standar global yang resmi (UN Tourism, 2024a). Negara-negara yang tidak mengadopsi kerangka ini akan tertinggal dalam benchmarking internasional dan potensial kehilangan akses ke insentif serta investasi yang semakin mengaitkan sustainability dengan performance.

Bagi Indonesia, ketiga faktor ini bertemu. Bali menunjukkan tanda-tanda overtourism di kawasan Kuta-Seminyak-Ubud. Pola konsumsi wisman ke Indonesia menunjukkan pergeseran menuju segmen premium (JNTO data untuk turis Jepang ke Indonesia, misalnya, menunjukkan peningkatan belanja). Komitmen iklim Indonesia dalam NDC memerlukan pengukuran emisi pariwisata yang saat ini belum ada. Semua ini menjadikan adopsi Quality Tourism bukan pilihan, tetapi keniscayaan.

5.2 IQTI: Potensi dan Risiko

Indonesia Quality Tourism Index yang diusulkan memiliki potensi transformatif yang signifikan, tetapi juga mengandung risiko yang perlu dimitigasi. Potensi pertama adalah harmonisasi pengukuran antar-institusi. Dengan IQTI sebagai framework bersama, BPS, Kemenpar, Imigrasi, Bank Indonesia, KLHK, dan pemerintah daerah dapat beroperasi dengan kerangka yang sama. Ini mengatasi masalah fragmentasi data yang sudah teridentifikasi dalam temuan. Potensi kedua adalah akuntabilitas kebijakan. Dengan IQTI yang dipublikasikan secara berkala, kinerja pariwisata Indonesia dapat dievaluasi secara multi-dimensi—bukan hanya dari jumlah kunjungan atau devisa, tetapi juga dari kepuasan wisman, wellbeing komunitas, dan environmental stewardship.

Potensi ketiga adalah diferensiasi per destinasi. IQTI yang dihitung per kluster destinasi memungkinkan kebijakan yang kontekstual. Bali mungkin memiliki skor tinggi di Dimensi 1 (Economic Value) tetapi rendah di Dimensi 5 (Environmental Stewardship) akibat overtourism. Raja Ampat mungkin memiliki skor tinggi di Dimensi 5 tetapi rendah di Dimensi 1 akibat skala ekonomi yang terbatas. Danau Toba mungkin memiliki ruang peningkatan di hampir semua dimensi. Kebijakan yang berbasis IQTI per destinasi akan lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan nasional yang seragam.

Namun, IQTI juga mengandung beberapa risiko. Risiko pertama adalah gaming of metrics—fenomena di mana aktor yang diukur memanipulasi data untuk mencapai target IQTI yang tinggi tanpa mencapai tujuan substantifnya. Misalnya, untuk meningkatkan skor Satisfaction, suatu destinasi mungkin mengarahkan survei hanya kepada wisman yang puas, atau untuk meningkatkan skor Environmental, suatu destinasi mungkin menyembunyikan data konsumsi air. Mitigasi risiko ini memerlukan protokol pengumpulan data yang ketat, audit independen, dan transparansi metodologi.

Risiko kedua adalah reductionism—kecenderungan untuk mereduksi realitas pariwisata yang kompleks ke dalam angka-angka yang sederhana. Skor komposit IQTI yang tunggal (misalnya 73 dari 100) dapat menyembunyikan keragaman situasi yang sebenarnya. Mitigasi risiko ini memerlukan publikasi IQTI tidak hanya sebagai skor komposit tetapi juga sebagai dashboard dengan lima dimensi yang terpisah, sehingga para pembuat kebijakan dapat melihat situasi yang lebih lengkap.

Risiko ketiga adalah policy bias toward measurable dimensions. Dimensi yang lebih mudah diukur (ekonomi) cenderung mendapat perhatian lebih dibandingkan dimensi yang sulit diukur (community wellbeing, cultural preservation). Ini dapat menghasilkan paradoks: IQTI yang bertujuan mendorong Quality Tourism justru memperkuat orientasi ekonomi yang sudah dominan. Mitigasi risiko ini memerlukan komitmen politik untuk berinvestasi dalam pengukuran dimensi-dimensi yang sulit, bahkan ketika hasilnya mungkin tidak flattering bagi citra pariwisata nasional.

5.3 Kombinasi Mandat, Kapasitas, dan Insentif

Benchmarking internasional menunjukkan bahwa adopsi Quality Tourism yang efektif memerlukan kombinasi tiga elemen. Mandat normatif menyediakan landasan hukum—misalnya UU No. 18/2025 Pasal 7 untuk Indonesia, Singapore Tourism Act untuk Singapura, atau New Zealand Tourism Strategy untuk Selandia Baru. Kapasitas pengukuran menyediakan data untuk monitoring dan evaluasi—misalnya IQTI yang diusulkan dalam artikel ini, STB Tourism Quality Framework untuk Singapura, atau NZTIA Sustainable Tourism Framework untuk Selandia Baru. Mekanisme insentif menggerakkan

perilaku aktor—misalnya International Visitor Conservation and Tourism Levy di Selandia Baru atau Sustainable Tourism Incentive di Singapura.

Ketiga elemen ini harus hadir bersama. Mandat tanpa kapasitas menghasilkan retorika tanpa implementasi (kondisi Indonesia saat ini dengan Pasal 7 UU No. 18/2025). Kapasitas tanpa mandat menghasilkan pengukuran tanpa konsekuensi kebijakan (kondisi TSA BPS yang berjalan tanpa adanya kewajiban kebijakan berbasis data ini). Insentif tanpa mandat dan kapasitas menghasilkan intervensi ad-hoc tanpa koherensi (misalnya Bali Levy yang beroperasi di level provinsi tanpa integrasi nasional).

Untuk Indonesia, operasionalisasi Quality Tourism melalui ketiga elemen ini memerlukan tiga Peraturan Pemerintah turunan UU No. 18/2025. PP pertama tentang Operasionalisasi Pariwisata Berkualitas yang mengamankan penggunaan IQTI sebagai framework pengukuran resmi dan menetapkan protokol pengumpulan data per dimensi. PP kedua tentang Sistem Data Kepariwisata Tunggal yang membangun platform terintegrasi untuk agregasi, analisis, dan publikasi IQTI. PP ketiga tentang Pungutan Wisatawan dengan alokasi dana yang eksplisit untuk pengembangan kapasitas pengukuran Quality Tourism dan insentif bagi destinasi yang meningkatkan skor IQTI.

Ketiga PP ini perlu dirancang terintegrasi—bukan sebagai dokumen terpisah yang mungkin bertentangan satu sama lain. Proses drafting yang coordinated antara BPS, Kemenpar, Kemenkeu, dan stakeholder lain menjadi kunci keberhasilan. Jika ketiga PP ini dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif dalam periode 2026-2028, Indonesia dapat menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasionalkan Quality Tourism secara komprehensif.

6. KESIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis pergeseran paradigmatik dari metrik kuantitas ke metrik kualitas dalam pengukuran kinerja pariwisata, mengevaluasi kapasitas Indonesia untuk mengoperasionalkan Quality Tourism sesuai mandat UU No. 18/2025 Pasal 7, dan merumuskan Indonesia Quality Tourism Index (IQTI) sebagai framework kontekstual. Tiga temuan utama dapat disimpulkan.

Pertama, pergeseran global ke Quality Tourism merupakan fenomena yang terkonfirmasi dengan baik, ditandai oleh adopsi Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism oleh UN Statistical Commission pada Februari 2024. Indonesia berada dalam posisi yang menarik: yield per wisman (USD 1.267) di atas rata-rata global tetapi di bawah benchmark regional—Singapura (USD 1.700), Jepang (USD 1.410), dan jauh di bawah Selandia Baru (USD 3.050). Ruang peningkatan yield Indonesia signifikan jika strategi Quality Tourism dapat diterapkan efektif.

Kedua, kapasitas pengukuran Indonesia saat ini belum memadai untuk mengoperasionalkan Quality Tourism secara komprehensif. Gap analysis terhadap lima dimensi framework Dwyer et al. (2014) menunjukkan bahwa Indonesia kuat pada Dimensi 1 (Economic Contribution) tetapi lemah pada Dimensi 4 (Community Wellbeing) dan Dimensi 5 (Environmental Stewardship). Gap disaggregation—ketidakmampuan data yang ada untuk di-breakdown per kluster destinasi atau segmen pasar—merupakan masalah umum di semua lima dimensi.

Ketiga, IQTI yang diusulkan dengan lima dimensi dan 25 indikator memberikan framework pengukuran yang kontekstual untuk Indonesia. IQTI dirancang dengan prinsip feasibility bertahap—Dimensi 1 dan 2 dapat langsung dihitung dengan data yang ada, sementara Dimensi 3, 4, dan 5 memerlukan pengembangan infrastruktur pengukuran baru. Operasionalisasi IQTI memerlukan kombinasi mandat normatif (UU No. 18/2025 Pasal 7), kapasitas pengukuran (IQTI itu sendiri), dan mekanisme insentif (Pungutan Wisatawan Pasal 57A).

6.1 Rekomendasi Kebijakan

Artikel ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan dalam periode 2026-2030.

Rekomendasi pertama: perumusan dan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Operasionalisasi Pariwisata Berkualitas sebagai turunan UU No. 18/2025 Pasal 7 pada 2026-2027. PP ini mengadopsi

IQTI sebagai framework pengukuran resmi dengan penahapan implementasi tiga fase: Fase 1 (2026-2027) dengan 10 indikator, Fase 2 (2027-2028) dengan 15 indikator, Fase 3 (2028-2030) dengan 25 indikator lengkap. PP juga menetapkan institusi penanggung jawab untuk setiap indikator dan protokol pertukaran data.

Rekomendasi kedua: investasi pada pengembangan infrastruktur pengukuran pada Dimensi 3, 4, dan 5 yang saat ini masih lemah. Ini mencakup (a) pengembangan Tourist Satisfaction Survey yang terstandarisasi mirip STB; (b) inisiasi Host Community Sentiment Survey di 10 Destinasi Super Prioritas; dan (c) integrasi data lingkungan dari KLHK ke dalam sistem data pariwisata. Anggaran untuk pengembangan ini dapat dialokasikan dari Pungutan Wisatawan yang diamanatkan UU No. 18/2025 Pasal 57A.

Rekomendasi ketiga: integrasi IQTI dengan sistem perencanaan nasional melalui RPJMN, RKP, dan Renstra Kemenpar. Target-target pariwisata yang selama ini dirumuskan dalam bentuk jumlah kunjungan (15 juta wisman pada 2024, 25 juta pada 2030) perlu dilengkapi dengan target IQTI yang spesifik per dimensi. Misalnya, target IQTI 75 pada 2030 untuk skor komposit nasional, dengan target spesifik per kluster destinasi. Integrasi ini memastikan bahwa Quality Tourism tidak hanya menjadi retorika tetapi menjadi komitmen politik yang terukur.

6.2 Arah Penelitian Lanjutan

Artikel ini membuka beberapa arah penelitian lanjutan. Pertama, studi implementasi pilot IQTI di destinasi-destinasi terpilih (misalnya 10 Destinasi Super Prioritas) untuk menguji feasibility indikator dan mendapatkan baseline data. Studi ini dapat menggunakan kombinasi survei primer dan analisis data sekunder dalam periode 6-12 bulan.

Kedua, studi kuantitatif yang menguji hubungan antara skor IQTI dan kinerja pariwisata jangka panjang. Hipotesis yang menarik untuk diuji: apakah destinasi dengan skor IQTI yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan yield yang lebih cepat, stabilitas kunjungan yang lebih baik pasca-krisis, dan dampak positif yang lebih tinggi terhadap komunitas lokal?

Ketiga, studi komparatif yang memperluas benchmarking ke negara-negara dengan tradisi Quality Tourism yang mapan di luar Asia-Pasifik. Pelajaran dari Italia (dengan tradisi cultural tourism), Austria (dengan wellness tourism), atau Kosta Rika (dengan eco-tourism) dapat memperkaya framework IQTI untuk adaptasi di destinasi-destinasi Indonesia yang memiliki karakteristik serupa.

Keempat, studi tentang integrasi IQTI dengan Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST) UN Tourism 2024. MST sebagai framework global baru memerlukan waktu untuk diadopsi secara penuh oleh negara-negara anggota. Studi tentang bagaimana IQTI dapat melengkapi MST (atau sebaliknya) akan berguna untuk harmonisasi pengukuran nasional dengan standar internasional.

6.3 Refleksi Penutup

Pergeseran dari metrik kuantitas ke metrik kualitas merepresentasikan perubahan fundamental dalam cara masyarakat global memahami keberhasilan pariwisata. Bukan lagi siapa yang paling banyak mendatangkan wisman, tetapi siapa yang paling baik memanfaatkan pariwisata untuk kesejahteraan berkelanjutan—ekonomi, sosial, lingkungan. Pergeseran ini selaras dengan transformasi paradigmatik yang lebih luas dalam pembangunan global pasca-SDGs.

Indonesia dengan UU No. 18/2025 Pasal 7 telah mengambil langkah normatif yang tepat. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan mandat normatif menjadi realitas operasional. IQTI yang diusulkan dalam artikel ini hanyalah salah satu cara menerjemahkannya—bukan yang final atau satu-satunya. Yang lebih penting adalah komitmen untuk serius mengukur apa yang penting, meskipun sulit, dan menggunakan hasil pengukuran untuk memperbaiki kebijakan.

Akhirnya, pergeseran ke Quality Tourism memerlukan pergeseran dalam imajinasi publik tentang pariwisata. Bukan lagi pariwisata sebagai ekstraksi sumber daya dari destinasi untuk kepentingan wisman, tetapi pariwisata sebagai hubungan timbal-balik yang memperkaya kedua belah pihak—

wisman dan destinasi, turis dan komunitas, pengunjung dan lingkungan. Framework pengukuran seperti IQTI dapat membantu merekonstruksi imajinasi ini, dari angka-angka abstrak menjadi komitmen konkret terhadap kualitas hubungan yang dibangun melalui pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, B. (2019). Kualitas pengalaman wisatawan mancanegara di Indonesia: Analisis survei kepuasan. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 13(1), 45-62.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Tourism Satellite Account Indonesia 2016-2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indonesia Tourism Satellite Account 2018-2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Tourism Satellite Account Indonesia 2022-2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Survei Karakteristik Wisatawan Mancanegara 2025*. Jakarta: BPS.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5-12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>
- Chaerunnisa, N. (2021). Destinasi pariwisata berkualitas: Studi kasus Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 17(2), 89-104.
- Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist experiences. *Sociology*, 13(2), 179-201. <https://doi.org/10.1177/003803857901300203>
- Damanik, J. (2020). Pariwisata berkualitas di Indonesia: Tantangan konseptual dan operasional. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 14(2), 101-120.
- Domroes, M. (2001). Conceptualizing state-controlled resort islands for an environment-friendly development of tourism: The Maldivian experience. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 22(2), 122-137.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2014). *Tourism economics and policy* (2nd ed.). Bristol: Channel View Publications.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2020). *Tourism economics and policy* (3rd ed.). Bristol: Channel View Publications.
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2018). Global trends in length of stay: Implications for destination management and climate change. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(12), 2087-2101. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1529771>
- Hall, C. M. (2010). Island destinations: A natural laboratory for tourism. Dalam J. Carlsen & R. Butler (Eds.), *Island tourism: Sustainable perspectives* (pp. 245-260). Wallingford: CAB International.
- Japan National Tourism Organization (JNTO). (2025). *Monthly Tourism Statistics December 2025*. Tokyo: JNTO.
- Japan National Tourism Organization (JNTO). (2026). *Annual Tourism Statistics 2025*. Tokyo: JNTO.
- Japan Tourism Agency (JTA). (2024). *Japan Tourism Strategic Plan 2023-2025*. Tokyo: JTA.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2025). *Naskah akademik UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2026). *Laporan Kinerja Pariwisata Indonesia 2025*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. *Tourism Planning & Development*, 16(4), 353-357. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604>
- Ministry of Business, Innovation and Employment New Zealand. (2024). *International Visitor Conservation and Tourism Levy: Annual Report 2023-2024*. Wellington: MBIE.
- Ministry of Tourism Maldives. (2025). *Maldives Tourism Yearbook 2024*. Malé: Ministry of Tourism.
- New Zealand Tourism Industry Association (NZTIA). (2021). *Sustainable Tourism Framework for Aotearoa New Zealand*. Wellington: NZTIA.

- Pitana, I. G. (2017). Pariwisata Bali: Dinamika dan tantangan menuju pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Master Pariwisata*, 4(1), 1-18.
- Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D., & McLennan, C. J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: A 25-year bibliometric analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 23(4), 517-535.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978790>
- Saputra, H. (2025, 28 Desember). Transformasi arsitektur hukum kepariwisataan Indonesia. Diakses dari <https://www.harjasaputra.com/>
- Scheyvens, R., & Momsen, J. H. (2008). Tourism and poverty reduction: Issues for small island states. *Tourism Geographies*, 10(1), 22-41.
- Singapore Tourism Board (STB). (2024). *Singapore Tourism Board Annual Report 2024*. Singapore: STB.
- Singapore Tourism Board (STB). (2025). *Tourism Statistics Publication 2024*. Singapore: STB.
- Statistics New Zealand. (2025). *Tourism Satellite Account 2024*. Wellington: Stats NZ.
- Tourism New Zealand. (2025). *Annual Report 2024/25*. Wellington: Tourism New Zealand.
- UN Tourism. (2021). *Global Code of Ethics for Tourism (Revised Edition)*. Madrid: UN Tourism.
- UN Tourism. (2024). *International Code for the Protection of Tourists*. Madrid: UN Tourism.
- UN Tourism. (2024a). *Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism*. Madrid: UN Tourism.
- UN Tourism. (2025). *World Tourism Barometer January 2025*. Madrid: UN Tourism.
- UN Tourism. (2026). *Tourism Data Dashboard: April 2026 Update*. Madrid: UN Tourism. Diakses dari <https://www.unwto.org/tourism-statistics>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180.
- UNWTO. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. Madrid & Paris: UNWTO & UNEP.
- UNWTO. (2010). *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008*. Madrid & New York: UNWTO & UN Statistics Division.